



Pajak Reklame Jembrana Bocor Ratusan Juta

Reklame Bodong Dirazia, Pengusaha Diingatkan

NEGARA - Pajak reklame masih belum bisa diandalkan untuk mencongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Jembrana. Pasalnya, pajak dari reklame yang didapat tidak sesuai target, karena mengalami kebocoran hingga ratusan juta.

Karena kebocoran pajak reklame yang sangat besar itu, mulai Rabu kemarin (23/1), tim dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Satpol PP melakukan penertiban terhadap reklame bodong. Penertiban itu mulai dilakukan dari wilayah Kelurahan Gilimanuk.

Satu-per satu papan reklame baik untuk promosi maupun nama usaha diperiksa apakah sudah berizin atau belum. Reklame yang ditemukan bodong kemudian ditemplei stiker bertuliskan "belum berizin" dan pemilik usaha baik toko maupun warung diminta untuk segera mengurus izinnya. Mereka diberikan waktu selama 15 hari untuk mengurus izin reklame yang dipasang tersebut.

"Kita berikan teguran dahulu, agar mengurus izinnya dalam waktu lima belas hari," ujar Made Cipta Wahyudi, Kabid Pajak Daerah dan lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Pemkab Jembrana.

Jika teguran itu tidak diindahkan, maka akan dilayangkan surat peringatan pertama dengan waktu tujuh hari. Jika pemilik reklame itu masih membandel, akan diberikan peringatan kedua dengan

waktu tujuh hari untuk mengurus izin. Namun jika tetap membandel akan dilayangkan teguran ketiga dengan waktu tiga hari. "Kalau masih tetap membandel sampai teguran ketiga, maka kita bersama Satpol PP akan turun untuk melakukan pembongkaran," tegasnya.

Penertiban di awal tahun ini, Kata Wahyudi, memang dilakukan untuk meminimalisir kebocoran PAD dari pajak reklame seperti yang terjadi tahun lalu. Di mana, tahun 2018 lalu, Pemkab Jembrana memasang target dari pajak reklame sebesar Rp 550 juta pendapatan yang diperoleh dari pajak reklame itu hanya Rp 300 juta lantaran terjadi kebocoran lebih dari Rp 250 juta.

"Kebocoran pajak reklame yang terjadi yang hampir setengah dari target

ini, maka kita sekarang melakukan intensifikasi dan eksetentifikasi pajak," ungkapnya. Tahun lalu memang sudah dilakukan ekstensi pajak, namun baru dimulai bulan September. Selama tiga bulan ekstensi pajak relame dilakukan, hasilnya memang cukup signifikan. Sehingga mulai awal tahun dilakukan intensifikasi dan eksetentifikasi pajak reklame ini mulai dilakukan.

"Untuk tahun ini



TAK BERIZIN: Tim Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bersama Satpol PP Jembrana, saat penertiban reklame bodong, kemarin.

kita ditarget pajak reklame sebesar Rp 600 juta. Untuk mencapai target ini maka sejak awal tahun kami mulai bergerak," jelasnya. (nom/han)

Edisi : Kamis, 24 Januari 2019

Hal. : 8



Proyek Senilai Rp 262 Miliar Mulai Digarap

● Kejar 400 Bed untuk Kamar Pasien

● Ada Ruang Khusus Bayi Tabung di RSUD Mangusada

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Proyek pembangunan gedung baru di Rumah Sakit Umum Mangusada di Kelurahan Kapal, Mangwi yang total menelan anggaran Rp 262 miliar mulai dikerjakan. Proyek pembangunan dengan membanguun gedung blok D, F, dan G itu diperkirakan akan rampung pada tahun 2020.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung IB Surya Suamba membenarkan proyek pembangunan gedung baru di RSUD Mangusada sudah mulai dikerjakan rekanan. "Sepertinya *mungkin* baru selesai meratakan tanahnya," ujarnya Sabtu (26/1).

Pembangunan gedung baru bernilai Rp 262 miliar ini sifatnya tahun jamak (multi years), sehingga, menurut Surya Suamba akan rampung hingga September 2020. Sesuai perencanaan awal, lanjut Surya Suamba, ada tiga gedung baru yang akan dibangun, yakni gedung blok D, blok F, dan blok G. "Itu nantinya akan digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nanti gedung D, F dan G akan digunakan sesuai fungsinya," jelasnya.

Dirut RSUD Mangusada Nyoman Gunarta mengatakan, pembangunan gedung ini karena untuk mengantisipasi kebutuhan kamar pasien. Selain itu juga untuk menjadikan RSUD Mangusada sebagai rumah sakit yang ramah anak, atau khusus memberikan pelayanan kesehatan terhadap anak.

"Perhitungannya kalau kami punya 400 ribu penduduk, minimal kami ada 400 bed untuk merawat pasien. Makanya kami sekarang mengejar di gedung D itu ada perawatan untuk pasien kelas satu dan kelas dua," ujarnya saat ditemui Sabtu (26/1).

Menurutnya dengan adanya gedung blok D, F dan G maka RSUD Mangusada nantinya akan mempunyai 400 bed perawatan. Sehingga tidak



(Sambungan)



MULAI DIKERJAKAN - Kondisi lahan di RSUD Mangusada yang sudah diratakan dan akan dibangun gedung D, F dan G, Sabtu (26/1)

akan kesulitan jika masyarakat membutuhkan pelayanan. Adanya pembangunan juga sebagai upaya RSUD Mangusada dalam meningkatkan pelayanan Radio-terapi.

"Nantinya, setelah pembangunan ini rampung, mungkin masukkan alatnya itu di akhir tahun, dilakukan ujicoba. Di tahun 2021 tepatnya di perte-

ngahan bulan kami bisa langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat,"ujarnya.

Dokter asal Sibang Gede, Abiansemal itu menjelaskan pembangunan itu direncanakan untuk menuju RSUD Mangusada menjadi rumah sakit ramah anak. Hal itu yang akan menjadi standar pelayanan dengan mengantisipasi pembangunan di gedung

F. Jadi di blok F tersebut akan menjadi gedung yang memberikan pelayanan kepada anak.

Mengenai total bed, RSUD Mangusada kini hanya memiliki 217 bed dengan semua kelas pelayanan. Menurutnya, untuk kelas satu dan isolasi (umum) hanya memiliki 10 bed. Kelas 2 mempunyai 16 bed. Sehingga bed ini akan dikejar, agar kelas satu ada

di angka 40 bed kelas 2 di angka 60 bed dan kelas 3 ada di angka 160 bed, sedangkan untuk VIP di angka 40 bed.

Sesuai dengan perencanaan awal, pembangunan gedung D akan digunakan untuk poliklinik dengan sistem *cluster*, dan ruang rawat inap untuk kelas II dan kelas I. Gedung F dimanfaatkan untuk pusat onkologi pe-

ayanan khusus kanker, ruangan pelayanan eksklusif seperti pelayanan bayi tabung, dan ruangan khusus rawat anak. Ruang penghubung kedua blok ini akan digunakan untuk ruangan operasi emergency. Sedangkan blok G untuk pusat pelayanan cuci darah. (gus)